



LAPORAN WORKSHOP



Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel

UNTUK DPRD KABUPATEN WONOGIRI

**Tanggal 30 Januari s/d 01 Februari 2026
Di The Sunan Hotel Solo**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

WORKSHOP

Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel



UNTUK DPRD KABUPATEN WONOGIRI

**Tanggal 30 Januari s/d 01 Februari 2026
Di The Sunan Hotel Solo**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah, kegiatan Workshop tentang “***Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel***” di The Sunan Hotel Solo pada hari Jum’at s/d Minggu, tanggal 30 Januari s/d 01 Februari 2026 dapat diselenggarakan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Workshop dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan analisis bagi anggota DPRD, terutama tentang RKPBD.

Panitia menyadari bahwa terselenggaranya Workshop dengan tertib dan lancar tidak dapat dilepaskan dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan persetujuan/rekomendasi pelaksanaan Workshop;
2. Semua peserta, pemipinan dan anggota, serta beberapa anggota sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri, yang telah berpartisipasi dan berperan aktif dalam Workshop;
3. Para pembicara yang telah berkenan memberikan ilmunya dengan memberikan makalah dan penjelasan-penjelasanannya dalam suasana diskusi yang mendalam dan interaktif;
4. Manajemen The Sunan Hotel Solo yang berkenan menerima dan menjadi tempat pelaksanaan Workshop.

Panitia juga menyadari, bahwa dalam pelaksanaan Workshop tentunya ada kekurangannya, untuk itu Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Workshop. Laporan ini meski tidak dapat dikatakan sempurna, namun Panitia berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang mendapatkan laporan ini. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 02 Februari 2026

Koordinator Pelaksana,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ttd

Labib Muttaqin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
BAB II : RENCANA KEGIATAN	
A. Penyelenggaraan	4
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
C. Tema dan Materi Workshop	5
D. Pengajar/Narasumber	6
E. Anggaran	6
F. Metodologi Pembelajaran	6
G. Jadwal Acara	7
BAB III : REALISASI KEGIATAN	
A. Pembukaan Workshop	8
B. Materi dan Narasumber	11
C. Sarana dan Prasarana	14
D. Evaluasi Penyelenggaraan	15
BAB IV : PENUTUP.....	
17	
LAMPIRAN	
1. Proposal Kegiatan Workshop	
2. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri No. B/24/000.9.10/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Persetujuan Mengikuti Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri;	
3. Surat Kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta	
4. Surat Rektor UMS, No. 36/C.6-VIII/SU/I/2026, tanggal 13 Januari 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Wonogiri;	
5. Surat Rekomendasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 073.3/PT06/1127.886/2026, tanggal 20 Januari 2026 perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.	
6. Daftar Hadir Peserta;	
7. Sertifikat Peserta	
8. Materi Workshop;	

**DOKUMENTASI WORKSHOP DPRD WONOGIRI
JUM'AT S/D MINGGU, 30 JANUARI S/D 01 FEBRUARI 2026
THE SUNAN HOTEL SOLO**









BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Peran DPRD tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Terbitnya Permendagri No. 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memperkuat kapasitas dan perannya dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Regulasi ini menekankan perlunya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang berbasis data serta berorientasi pada hasil (result-based planning). Dengan demikian, DPRD dituntut untuk lebih proaktif dalam memastikan bahwa RKPD 2026 disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Wonogiri.

Selain itu, dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif. DPRD sebagai representasi rakyat harus mampu mengawal proses perencanaan agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang dapat mengarahkan pembangunan daerah menuju visi jangka panjang. Workshop ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran, diskusi, dan penguatan kapasitas bagi anggota DPRD Wonogiri dalam memahami substansi Permendagri No. 10 Tahun 2025 serta mengimplementasikannya secara efektif dalam penyusunan RKPD 2026.

Dengan adanya workshop ini, DPRD Wonogiri diharapkan mampu memperdalam pemahaman terhadap regulasi terbaru yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga setiap anggota dapat menguasai substansi kebijakan dan mengimplementasikannya secara tepat dalam proses legislasi maupun pengawasan. Workshop ini juga diharapkan dapat menguatkan

peran DPRD dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas penyusunan RKPD, sehingga dokumen perencanaan tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen strategis yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan mampu membangun komitmen bersama di antara anggota DPRD untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sehingga peran DPRD sebagai representasi rakyat dapat semakin nyata dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bermaksud menyelenggarakan kegiatan workshop untuk DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tema: *“Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel”*.

B. Tujuan

Workshop ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman anggota DPRD Wonogiri terhadap substansi Permendagri No. 10 Tahun 2025, sehingga mampu mengimplementasikannya secara efektif dalam penyusunan RKPD 2026. Selain itu, workshop ini diharapkan dapat menguatkan peran pengawasan dan legislasi DPRD dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, DPRD juga diharapkan dapat membangun komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kemendagri No. 895.3/7330/Diklat, tanggal 27 November 2012, perihal Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD;
4. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri No. B/24/000.9.10/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Persetujuan Mengikuti Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri;
5. Surat Rektor UMS, No. 36/C.6-VIII/SU/I/2026, tanggal 13 Januari 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Surat Rekomendasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 073.3/PT06/1127.886/2026, tanggal 20 Januari 2026 perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.
7. Surat Kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta

BAB II

RENCANA KEGIATAN

A. Penyelenggaraan

Workshop yang direncanakan untuk DPRD Kabupaten Wonogiri ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas legislatif daerah, khususnya dalam menghadapi implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025. Regulasi tersebut menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis data, sehingga DPRD dituntut untuk lebih aktif memastikan bahwa RKPD 2026 disusun secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya workshop ini, anggota DPRD diharapkan mampu memahami substansi regulasi secara mendalam sekaligus mengaplikasikannya dalam fungsi legislasi dan pengawasan.

Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2026 di The Sunan Hotel Solo. Pemilihan lokasi ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga untuk menciptakan suasana kondusif bagi proses pembelajaran dan diskusi intensif. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan peserta dapat fokus mengikuti rangkaian kegiatan tanpa hambatan teknis, sehingga tujuan workshop dapat tercapai secara optimal.

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bertindak sebagai penyelenggara sekaligus mitra akademik dalam kegiatan ini. Sebagai institusi yang memiliki pengalaman dalam penguatan kapasitas legislatif, UMS akan menyediakan narasumber, materi, serta metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan anggota DPRD. Kehadiran UMS juga menegaskan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan lembaga legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Materi workshop dirancang untuk mencakup tiga aspek utama. Pertama, *capacity building* yang bertujuan membangun semangat kepemimpinan dan integritas anggota DPRD. Kedua, pemahaman substansi Permendagri No. 10 Tahun 2025 dalam penyusunan RKPD, yang akan disampaikan langsung oleh perwakilan Kemendagri. Ketiga, peran DPRD dalam pengendalian dan evaluasi RKPD 2026,

yang akan dibahas oleh akademisi. Dengan kombinasi materi ini, peserta diharapkan memperoleh perspektif komprehensif mengenai peran strategis DPRD.

Metode pelaksanaan workshop menggunakan pendekatan partisipatoris. Kegiatan akan diawali dengan ceramah untuk memberikan landasan teoritis, kemudian dilanjutkan dengan dialog aktif agar peserta dapat mengkritisi dan mendalami materi. Model ini memungkinkan anggota DPRD tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pemahaman yang diperoleh lebih kritis dan aplikatif.

Tujuan utama dari workshop ini adalah memperdalam pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi terbaru, sehingga mereka mampu mengimplementasikan Permendagri No. 10 Tahun 2025 secara efektif dalam penyusunan RKPD 2026. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat peran DPRD dalam fungsi pengawasan dan legislasi, khususnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh, DPRD dapat lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi rakyat.

Secara keseluruhan, workshop ini menjadi momentum penting bagi DPRD Wonogiri untuk membangun komitmen bersama dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, DPRD diharapkan semakin mampu menjalankan perannya dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sehingga dokumen perencanaan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen strategis yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Pelaksanaan kegiatan workshop direncanakan dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan insyaa Allah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu Jum'at s/d Minggu, 30 Januari s/d 01 Februari 2026.

C. Tema dan Materi Workshops

Tema dalam Workshop ini adalah tentang “*Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang*

Transparan dan Akuntabel” Adapapun materi yang hendak disampaikan dan pembicara dalam kegiatan ini adalah:

1. Capacity Building Anggota DPRD – Membangun Semangat Kepemimpinan dan Integritas dalam Perencanaan Daerah;
2. Penguatan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Daerah yang Akuntabel Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025;
3. Peran DPRD dalam Mewujudkan RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel;

D. Pengajar/Narasumber.

Pengajar (Narasumber) dalam kegiatan Workshop kali ini terdiri 3 (Tiga) orang tenaga yang ahli di bidang masing-masing, yaitu:

1. Eko Suseno, HRM, SE, MM. PFC.
2. DR. Jaka Winarna M.SI., AK.
3. Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si, Ph.D.

E. Anggaran

Kegiatan workshop di danai oleh APBD Kab. Wonogiri. Setiap peserta dibebani biaya sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan fasilitas akomodasi penginapan, makan, seminar kit, bahan-bahan workshop, dan sertifikat dari Penyelenggara.

F. Metodologi Pembelajaran

Metode yang hendak digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan model partisipatoris, yakni diawali dengan ceramah secara garis besar sebagai pengantar dan dilanjutkan dengan dialog secara aktif. Dengan model ini diharapkan akan diperoleh pengetahuan dan pemahaman materi secara kritis dan mendalam. Lebih dari itu adalah dicapai suatu pengetahuan dan pemahaman teoritik dan aplikatif.

G. Jadwal Acara

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi Dan Narasumber	
Jum'at, 30 Januari 2026	14.00 - 18.00	Check In dan Registrasi di Hotel	Jam Pelajaran (JP)* *1 JP = 60 Menit
	18.00 – 19.00	MAKAN MALAM	
	19.00 - 22.00	Pembukaan Workshop 1. Menyanyikan Indonesia Raya 2. Laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Sekretaris DPRD Kab. Wonogiri 3. Sambutan oleh Ketua DPRD Kab. Wonogiri 4. Sambutan oleh Kepala BPSDMD Prov. Jawa Tengah 5. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta 6. Doa	
	19.00 - 22.00	Materi I: <i>Capacity Building Anggota DPRD – “Membangun Semangat Kepemimpinan dan Integritas dalam Perencanaan Daerah”</i> Oleh: Eko Suseno, HRM, SE, MM. PFC.	
Sabtu, 31 Januari 2026	06.00 - 08.00	MAKAN PAGI	
	08.00 - 11.00	Materi II: <i>Penguatan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Daerah yang Akuntabel Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025</i> Oleh: DR. Jaka Winarna M.SI., AK.	3 JP
	11.00 - 11.15	Coffe break	
	11.15 - 12.00	Dilanjutkan Diskusi dan Pendalaman Materi	
	12.00 - 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 16.00	Materi III: <i>Peran DPRD dalam Mewujudkan RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel</i> Oleh: Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si, Ph.D.	3 JP
	16.00 - 16.30	Coffe break	
	16.30 - 17.30	Dilanjutkan Diskusi dan Pendalaman Materi	
17.30 ...	Istirahat dan Makan Malam		
Minggu, 1 Februari 2026	06.00 - 08.30	MAKAN PAGI	
	09.00 - 11.00	Evaluasi dan Penutupan	
	11.00 -----	Check Out	

BAB III

REALISASI KEGIATAN

A. Pembukaan Workshop

Pembukaan acara workshop dengan tema “Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel” diselenggarakan di The Sunan Hotel Solo. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari para pejabat dan tokoh yang hadir.

Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua BPSDMD Jawa Tengah, Ibu Dr. Uswatun Hasanah, M.Pd. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang telah memfasilitasi workshop ini. Beliau menekankan bahwa indikator kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan dan papan, tetapi juga aspek kesehatan mental. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang memanipulasi data demi memperoleh bantuan langsung tunai (BLT). Beliau menegaskan bahwa kegiatan wakil rakyat harus taktis dan berdampak nyata, serta mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan agar eksekutif memiliki keahlian yang memadai sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Sambutan kedua disampaikan oleh Rektor UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. Beliau mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Wonogiri yang kembali mempercayakan UMS sebagai mitra dalam penyelenggaraan workshop. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia agar seluruh masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Beliau juga menegaskan pentingnya mengatasi persoalan kesehatan mental yang dialami masyarakat, salah satunya tercermin dari rendahnya loyalitas terhadap produk dalam negeri. Selain itu, beliau mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta mengingatkan agar menjauhi sektor pertambangan karena dampak buruknya terhadap lingkungan. Di akhir sambutannya, beliau menekankan bahwa kegiatan anggota dewan tidak hanya harus berdampak, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Sambutan terakhir sekaligus membuka acara workshop disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Bapak Sriyono, S.Pd. Beliau menyampaikan terima kasih kepada UMS yang telah berulang kali menjadi mitra dalam meningkatkan kapasitas anggota dewan. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa workshop ini sangat penting, khususnya bagi anggota DPRD yang baru, dalam memahami fungsi budgeting untuk menyusun anggaran belanja daerah. Beliau berharap kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dapat memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas bersama eksekutif.

Setelah sambutan tersebut, Bapak Sriyono secara resmi membuka acara workshop dengan membaca bismillah, yang kemudian ditutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan acara ditutup oleh MC dengan memberikan informasi bahwa kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi pertama yang disampaikan oleh Bapak Eko Suseno, HRM, SE, MM, PFC.

Peserta workshop berjumlah 48 orang anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Kehadiran seluruh peserta ini menunjukkan komitmen DPRD dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas peran legislatif dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun nama-nama peserta Workshop adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	SRIYONO, S.Pd.	Ketua DPRD Kab. Wonogiri
2	SUGENG AHMADY	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri
3	KRISYANTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri
4	SURYO SUMINTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri
5	ARUM SUBEKTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
6	BAMBANG SADRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
7	AZALEA PUTERI UTAMI, S.Tr.Li.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
8	ARI SUMANTRI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri

9	URIN TRI HARTONO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
10	ZHAKARIA ANAN FACHRUZI, SST.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
11	DUDIE ADYTIA KURNIAWAN, S.ST.Par., S.E., M.M.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
12	RENI TORILIANA, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
13	WIDIYATNO, S.H	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
14	WAWAN ARIFianto, S.T	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
15	DWI PRASETYO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
16	AYU PUTRI KARMILASARI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
17	SUTOYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
18	SUPRAPTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
19	KISYANTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
20	SRI REJEKI, S.Ak.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
21	SARWO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
22	ANY WAHYU SETIAWATI, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
23	NYAMIK SAPTATI, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
24	YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
25	INDAH RETNOWATI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
26	SUYOTO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
27	MARIJI, S.IP.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
28	ASTARNO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
29	HAMID KURNIAWAN, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
30	IWAN SUSILO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri

31	AHMAD NASIR	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
32	JATI WALUYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
33	GIMANTO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
34	TITIK SUGIYARTI, S.Sos.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
35	SUPRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
36	DANI MURSITO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
37	YADI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
38	HERU SUKOCO, S.Psi.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
39	SUSANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
40	H. ABDULLAH, S.Ag.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
41	NOVRI ROESMONO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
42	IRWAN HARI PURNOMO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
43	ROMANDHANI ANDANG NUGROHO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
44	LUTFI ANGGA PRADANA	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
45	INTAN KUSUMA SUSANTI, S.Gz.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
46	JOKO WARSITO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
47	SUGIHARNO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri
48	ISKANDAR, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri

B. Materi dan Narasumber

Materi yang disampaikan dalam workshop ini mencakup tugas pokok dan fungsi DPRD, dengan narasumber para akademisi dan praktisi yang mempunyai kemampuan mendalam dan komprehensif atas materi tersebut. Adapun materi dan narasumber tersebut adalah:

1. Capacity Building Anggota DPRD – “Membangun Semangat Kepemimpinan dan Integritas dalam Perencanaan Daerah;

- a. **Pembicara:** Eko Suseno, HRM, SE, MM. PFC
- b. **Topik utama:** Penguatan kepemimpinan dan integritas anggota DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
- c. **Pokok bahasan:**
 - Pentingnya kepemimpinan yang visioner dan berintegritas dalam mengawal kebijakan daerah.
 - Peran DPRD sebagai pengawas, legislator, dan penganggar yang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
 - Integritas anggota DPRD sebagai modal utama dalam menjaga kepercayaan publik.
 - Tantangan kepemimpinan di era transparansi dan akuntabilitas, termasuk isu kesehatan mental masyarakat serta loyalitas terhadap produk dalam negeri.
 - Strategi membangun kolaborasi dengan eksekutif agar keputusan pembangunan tepat sasaran.
 - Pentingnya menghindari praktik-praktik yang merusak lingkungan, serta mendorong sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai prioritas pembangunan.
 - Dorongan agar setiap kegiatan DPRD tidak hanya berdampak, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Penguatan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Daerah yang Akuntabel Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025

- a. **Pembicara:** DR. Jaka Winarna M.SI., AK. (Akademisi UNS)
- b. **Topik Utama:** penguatan peran DPRD dalam memastikan perencanaan daerah yang akuntabel sesuai ketentuan Permendagri No. 10 Tahun 2025.
- c. **Pokok Bahasan:**
 - DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran strategis dalam siklus perencanaan pembangunan.

- Permendagri No. 10 Tahun 2025 menekankan integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis data.
- Akuntabilitas perencanaan daerah harus diwujudkan melalui transparansi dokumen RKPD dan keterlibatan masyarakat.
- DPRD wajib memastikan bahwa RKPD tidak hanya administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
- Fungsi pengawasan DPRD harus diperkuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis.
- Pentingnya kolaborasi DPRD dengan eksekutif, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menjaga kualitas perencanaan.
- DPRD dituntut membangun integritas kelembagaan agar setiap keputusan memiliki legitimasi moral dan politik.

3. Peran DPRD dalam Mewujudkan RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel;

- Pembicara:** Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si, Ph.D.
- Topik Utama:** peran DPRD dalam memastikan RKPD 2026 disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Pokok Bahasan:**
 - DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tanggung jawab memastikan RKPD 2026 disusun sesuai kebutuhan masyarakat.
 - Transparansi perencanaan diwujudkan melalui keterbukaan dokumen, akses informasi publik, dan partisipasi masyarakat.
 - Akuntabilitas perencanaan menuntut adanya mekanisme evaluasi yang jelas serta laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - DPRD harus mengawal integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen dan implementasi.
 - Pentingnya kolaborasi DPRD dengan eksekutif, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menjaga kualitas RKPD.
 - DPRD dituntut meningkatkan kapasitas anggota agar mampu memahami substansi regulasi terbaru, khususnya Permendagri No. 10 Tahun 2025.

- Peran DPRD tidak hanya dalam fungsi legislasi, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan setiap kebijakan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat.

C. Sarana dan Prasarana

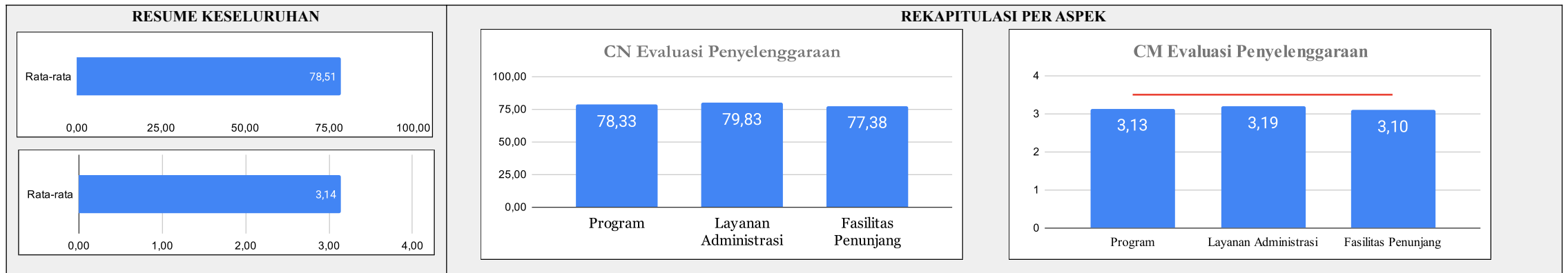
Kegiatan Workshop dilaksanakan di *The Sunan Hotel Solo* selama tiga hari, yakni pada hari Jum'at hingga Minggu, tanggal 30 Januari sampai dengan 01 Februari 2026. Fasilitas yang disediakan oleh pihak penyelenggara tergolong representatif, mencakup kamar dengan kelengkapan *big bed*, sofa, televisi berlangganan (*Indovision*), pendingin ruangan (*AC*), pemanas air, serta ruang tamu. Selain itu, peserta juga memperoleh akses jaringan internet (*Wi-Fi*), ruang pertemuan yang nyaman, konsumsi berupa makan besar tiga kali sehari, *snack* dan *coffee break* dua kali setiap sesi, serta makalah yang dihimpun dalam bentuk buku. Peserta Workshop diberikan *seminar kit* beserta bahan-bahan kegiatan dalam bentuk makalah yang dibukukan. Sebagai bentuk pengakuan resmi atas partisipasi, setiap peserta akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta.



REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	31/01/2026
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	UMS - Workshop Dewan Kabupaten Wonogiri
LOKASI PELAKSANAAN	The Sunan Hotel Solo



Jumlah Responden	NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
			CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
50	1	Program	78,33	Cukup Memuaskan	3,13	DBCM
	2	Layanan Administrasi	79,83	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM
	3	Fasilitas Penunjang	77,38	Cukup Memuaskan	3,10	DBCM
	Rata-rata		78,51	Cukup Memuaskan	3,14	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

NO	ASPEK	INDIKATOR		JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1	Program diklat merupakan topik yang aktual	50	0	6	30	14	79,00	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	88,00%	12,00%
		1.2	Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	50	0	4	31	15	80,50	Memuaskan	3,22	DBCM	92,00%	8,00%
		1.3	Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	50	0	11	27	12	75,50	Cukup Memuaskan	3,02	DBCM	78,00%	22,00%
2	Layanan Administrasi	2.1	Sistem pemanggilan peserta	50	0	3	36	11	79,00	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	94,00%	6,00%
		2.2	Sistem registrasi peserta	50	0	2	36	12	80,00	Cukup Memuaskan	3,20	DBCM	96,00%	4,00%
		2.3	Pelayanan dan sikap petugas	50	0	1	37	12	80,50	Memuaskan	3,22	DBCM	98,00%	2,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1	Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	50	0	5	32	13	79,00	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	90,00%	10,00%
		3.2	Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	50	1	3	34	12	78,50	Cukup Memuaskan	3,14	DBCM	92,00%	8,00%
		3.3	Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	50	1	6	32	11	76,50	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM	86,00%	14,00%
		3.4	Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	50	0	11	27	12	75,50	Cukup Memuaskan	3,02	DBCM	78,00%	22,00%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Meningkatkan peran DPRD dalam implementasi Permendagri
- 2 Penyampaian materi tegas, jelas dan relepan
- 3 Materi mohon di tambah strategi penyusunan APBD dalam menghadapi efisiensi dan kiat kiat nya
- 4 Diusahakan pemateri yang pro aktif dengan audien, tidak spaneng tapi mutunya baik
- 5 Nasum di usahakan yang bisa menjiwai dan menguasai materi dan bisa membuat audiensi merasa senang
- 6 Nara sumber yang aktif dan menguasai
- 7 Untuk realisasi program program butuh pendampingan extra...

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Workshop bertema “*Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel*” telah diselenggarakan di *The Sunan Hotel Solo* pada hari Jum’at hingga Minggu, tanggal 30 Januari sampai dengan 01 Februari 2026. Workshop ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang peserta. Materi kegiatan terbagi dalam tiga subtema yang disampaikan oleh para narasumber berkompeten, yaitu Eko Suseno, HRM, SE, MM., PFC; Dr. Jaka Winarna, M.Si., Ak. (Akademisi UNS); serta Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si., Ph.D. (Akademisi UMS). Sarana dan prasarana yang disediakan oleh *The Sunan Hotel Solo* terbukti memadai dan relevan dengan kebutuhan peserta, sehingga mendukung kelancaran serta keberhasilan jalannya kegiatan.

Sebagai penutup, kami selaku penyelenggara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri beserta Sekretaris Dewan atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan Workshop ini. Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, sekaligus berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak hotel yang telah menyiapkan seluruh kebutuhan kegiatan dengan baik, sehingga Workshop dapat berlangsung secara optimal.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROPOSAL

PENDALAMAN MATERI

WORKSHOP

**Penguatan Peran DPRD dalam
Implementasi Permendagri No. 10 Tahun
2025: Menyongsong RKPD 2026 yang
Transparan dan Akuntabel**



UNTUK DPRD KABUPATEN WONOGIRI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

**Tanggal 30 Januari s/d 01 Februari 2026
Di The Sunan Hotel Solo**

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Peran DPRD tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Terbitnya Permendagri No. 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memperkuat kapasitas dan perannya dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Regulasi ini menekankan perlunya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang berbasis data serta berorientasi pada hasil (result-based planning). Dengan demikian, DPRD dituntut untuk lebih proaktif dalam memastikan bahwa RKPD 2026 disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Wonogiri.

Selain itu, dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif. DPRD sebagai representasi rakyat harus mampu mengawal proses perencanaan agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang dapat mengarahkan pembangunan daerah menuju visi jangka panjang. Workshop ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran, diskusi, dan penguatan kapasitas bagi anggota DPRD Wonogiri dalam memahami substansi Permendagri No. 10 Tahun 2025 serta mengimplementasikannya secara efektif dalam penyusunan RKPD 2026.

Dengan adanya workshop ini, DPRD Wonogiri diharapkan mampu memperdalam pemahaman terhadap regulasi terbaru yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga setiap anggota dapat menguasai substansi kebijakan dan mengimplementasikannya secara tepat dalam proses legislasi maupun pengawasan. Workshop ini juga diharapkan dapat menguatkan peran DPRD dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas penyusunan RKPD, sehingga dokumen perencanaan tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen strategis yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan mampu membangun komitmen bersama di antara anggota DPRD untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,

sehingga peran DPRD sebagai representasi rakyat dapat semakin nyata dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bermaksud menyelenggarakan kegiatan workshop untuk DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tema: ***“Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel”***.

B. Tujuan

Workshop ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman anggota DPRD Wonogiri terhadap substansi Permendagri No. 10 Tahun 2025, sehingga mampu mengimplementasikannya secara efektif dalam penyusunan RKPD 2026. Selain itu, workshop ini diharapkan dapat menguatkan peran pengawasan dan legislasi DPRD dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, DPRD juga diharapkan dapat membangun komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

C. Materi dan Narasumber

Materi yang disampaikan dalam workshop ini mencakup tugas pokok dan fungsi DPRD, dengan narasumber para akademisi dan praktisi yang mempunyai kemampuan mendalam dan komprehensif atas materi tersebut. Adapun materi dan narasumber tersebut adalah:

1. *Capacity Building Anggota DPRD – “Membangun Semangat Kepemimpinan dan Integritas dalam Perencanaan Daerah”*;
Oleh: Eko Suseno, HRM, SE, MM. PFC.
2. *Pemahaman Substansi Permendagri No. 10 Tahun 2025 dalam Penyusunan RKPD*
Oleh: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
3. Peran DPRD dalam Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2026.
Oleh: Akademisi

D. Metode Pelaksanaan Workshop

Metode yang hendak digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan model partisipatoris, yakni diawali dengan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan dialog secara aktif. Dengan model ini diharapkan akan diperoleh pengetahuan dan pemahaman materi secara kritis dan mendalam. Lebih dari itu adalah dicapai suatu pengetahuan dan pemahaman teoritik dan aplikatif.

E. Peserta, Kontribusi dan Sertifikasi

Kegiatan workshop ini diharapkan diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Setiap peserta dibebani biaya sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan fasilitas akomodasi penginapan, makan, seminar kit, bahan-bahan workshop, dan sertifikat dari Penyelenggara.

F. Personalia Penyelenggara

Personalia kegiatan workshop adalah sebagai berikut:

Penanggung jawab	: Rektor UMS
Pengarah	: Prof. Supriyono, Ph.D. (Wk. Rektor V UMS) Andy Bawono, S.E., M.Si., Ph.D (Sekretaris Rektor). Sudaryono, S.H., M.H.
Koordinator Pelaksana	: Labib Muttaqin, S.H, M.H.
Sekretaris	: M. Junaidi, S.Ag, S.H, M.Ag. Andi Widagdo, S.Pd. Suni Tuti, S.P., M.AP.
Bendahara	: Khadijah Zahra Nurbana, S.Kom. Tugiyanti, S.E.
Sie. Pembantu umum	: Tri Raharjo Agung S

G. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan workshop direncanakan dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan insyaa Allah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu Jum'at s/d Minggu, 30 Januari s/d 01 Februari 2026.

H. Jadwal Kegiatan*

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi Dan Narasumber	
Jum'at, 30 Januari 2026	14.00 - 18.00	Check In dan Registrasi di Hotel	
	18.00 – 19.00	MAKAN MALAM	
	19.00 - 22.00	Pembukaan Workshop 1. Menyanyikan Indonesia Raya 2. Laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Sekretaris DPRD Kab. Wonogiri 3. Sambutan oleh Ketua DPRD Kab. Wonogiri 4. Sambutan oleh Kepala BPSDMD Prov. Jawa Tengah 5. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta 6. Doa	Jam Pelajaran (JP)* *1 JP = 60 Menit
	19.00 - 22.00	Materi I: Capacity Building Anggota DPRD – “Membangun Semangat Kepemimpinan dan Integritas dalam Perencanaan Daerah” Oleh: Eko Suseno, HRM, SE, MM. PFC.	3 JP
Sabtu, 31 Januari 2026	06.00 - 08.00	MAKAN PAGI	
	08.00 - 11.00	Materi II: Penguatan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Daerah yang Akuntabel Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025 Oleh: DR. Jaka Winarna M.SI., AK.	3 JP
	11.00 - 11.15	Coffe break	
	11.15 - 12.00	Dilanjutkan Diskusi dan Pendalaman Materi	
	12.00 - 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 16.00	Materi III: Peran DPRD dalam Mewujudkan RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel Oleh: Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si, Ph.D.	3 JP
	16.00 - 16.30	Coffe break	
	16.30 - 17.30	Dilanjutkan Diskusi dan Pendalaman Materi	
17.30 ...	Istirahat dan Makan Malam		

Minggu, 1 Februari 2026	06.00 - 08.30	MAKAN PAGI	
	09.00 - 11.00	Evaluasi dan Penutupan	
	11.00 -----	Check Out	

*Catatan: Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel.



Surakarta, 10 Januari 2026
Koordinator Penyelenggara

Labib Muttaqin, S.H, M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Jalan Pemuda II Nomor 4 Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273) 321066, Fax. (0273) 325765
Laman www.dprd-wonogirikab.go.id, Pos-el dprdwonogiri@wonogirikab.go.id

Wonogiri, 15 Januari 2026

Nomor : B/24/000.9.10/II/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Penawaran mengikuti workshop

Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
di
Surakarta

Menindaklanjuti surat dari Rektor universitas Muhammadiyah Surakarta nomor 26/C.7-II/SU/II/2026, tanggal 10 Januari 2026, Perihal Penawaran Mengikuti Workshop.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini DPRD Kabupaten Wonogiri menerima penawaran tersebut untuk mengikuti kegiatan Workshop/Bimtek untuk Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, yang akan diselenggarakan besok pada hari Jum'at s.d Minggu, tanggal 30 Januari s.d 1 Pebruari 2026, bertempat di The sunan hotel solo, adapun daftar peserta Bimtek sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerja samanya dluapkan terima kasih

KETUA DPRD,



Sriyono, S.Pd

**DAFTAR PESERTA BIMTEK/WORKSHOP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN
1	SRIYONO, S.Pd.	KETUA
2	SUGENG AHMADY	WAKIL KETUA
3	KRISYANTO	WAKIL KETUA
4	SURYO SUMINTO	WAKIL KETUA
5	ARUM SUBEKTI	ANGGOTA
6	BAMBANG SADRIYANTO	ANGGOTA
7	AZALEA PUTERI UTAMI, S.Tr.Li.	ANGGOTA
8	ARI SUMANTRI	ANGGOTA
9	URIN TRI HARTONO, S.E.	ANGGOTA
10	ZHAKARIA ANAN FACHRUZI, SST.	ANGGOTA
11	DUDIE ADYTIA KURNIAWAN, S.ST.Par., S.E., M.M.	ANGGOTA
12	RENI TORILIANA, A.Md.	ANGGOTA
13	WIDIYATNO	ANGGOTA
14	WAWAN ARIFianto	ANGGOTA
15	DWI PRASETYO, S.T.	ANGGOTA
16	AYU PUTRI KARMILASARI	ANGGOTA
17	SUTOYO	ANGGOTA
18	SUPRAPTO	ANGGOTA
19	KISYANTI	ANGGOTA
20	SRI REJEKI, S.Ak.	ANGGOTA
21	SARWO	ANGGOTA
22	ANY WAHYU SETIAWATI, S.E.	ANGGOTA
23	NYAMIK SAPTATI, S.Pd.	ANGGOTA
24	YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom.	ANGGOTA
25	CATUR WINARKO	ANGGOTA
26	INDAH RETNOWATI	ANGGOTA
27	SUYOTO, S.E.	ANGGOTA
28	MARIJI, S.IP.	ANGGOTA

29	ASTARNO, S.T.	ANGGOTA
30	GUNARIYANTO	ANGGOTA
31	HAMID KURNIAWAN, S.E.	ANGGOTA
32	IWAN SUSILO, S.Pd.	ANGGOTA
33	AHMAD NASIR	ANGGOTA
34	JATI WALUYO	ANGGOTA
35	GIMANTO, S.H.	ANGGOTA
36	TITIK SUGIYARTI, S.Sos.	ANGGOTA
37	SUPRIYANTO	ANGGOTA
38	DANI MURSITO, S.H.	ANGGOTA
39	YADI	ANGGOTA
40	HERU SUKOCO, S.Psi.	ANGGOTA
41	SUSANTO	ANGGOTA
42	H. ABDULLAH, S.Ag.	ANGGOTA
43	NOVRI ROESMONO	ANGGOTA
44	IRWAN HARI PURNOMO	ANGGOTA
45	ROMANDHANI ANDANG NUGROHO	ANGGOTA
46	LUTFI ANGGA PRADANA	ANGGOTA
47	INTAN KUSUMA SUSANTI, S.Gz.	ANGGOTA
48	JOKO WARSITO	ANGGOTA
49	SUGIHARNO, S.Pd.	ANGGOTA
50	ISKANDAR, A.Md.	ANGGOTA

KETUA DPRD



SRIYONO, S.Pd



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (UMS)
TENTANG**



PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jln. Pemuda II No. 4 Wonogiri

Bertindak sebagai Pihak Pertama.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum.

Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Alamat : Jln. A. Yani Tromol Pos I Pabelan, Kartasura, Surakarta 57102

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

**PEMBIAYAAN, WAKTU DAN TEMPAT
WORKSHOP**

Pembiayaan Kegiatan Workshop ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026. Workshop ini dilaksanakan pada hari Jum'at s/d Minggu, 30 Januari s/d 01 Februari 2026, dan bertempat di The Sunan Hotel Solo.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Workshop;
 - b. Berhak mendapatkan akomodasi, konsumsi, bahan ajar, seminarkit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menandatangani sertifikat.
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.
 - f. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Workshop dari **PIHAK KEDUA**.
3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop sebesar. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.
 - b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Workshop dari Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.
 - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (adendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri



Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197009201990011001

PIHAK KEDUA

Rektor UMS



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
Guru Besar
NIDN. 0028046501

Nomor : 38/C.6-VIII/SU/I/2026 13 Januari 2026 M
Lamp : 1 (Satu) Berkas 24 Rajab 1447 H
Hal : **Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop DPRD Kab. Wonogiri**

Kepada : Yth. **Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah**
di – Semarang

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Menjadi keinginan kita bersama, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya oleh DPRD, dapat lebih bermakna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yakni terwujudnya tujuan otonomi daerah yang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya peningkatan kemampuan SDM DPRD, khususnya melalui pendalaman materi.

Untuk maksud itulah, Universitas Muhammadiyah Surakarta berencana untuk menyelenggarakan Workshop untuk DPRD Kabupaten Wonogiri. Adapun kegiatan tersebut insyaa Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at s/d Minggu, 30 Januari s/d 01 Februari 2026.
Tempat : The Sunan Hotel Solo
Tema : "Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi
Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong
RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel"

Besar harapan kami agar Bapak berkenan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Rektor,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
NIDN 0028046501

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri;
3. Arsip;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Januari 2026

Nomor : 073.3/PT06/1127.886/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri

Rektor Universitas Muhamadiyah
Surakarta
di

TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 38/C.6-VIII/SU/I/2026, tanggal 13 Januari 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Peran DPRD Dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 Yang Transparan Dan Akuntabel yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan 01 Februari 2026 bertempat di The Sunan Hotel Solo.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Capacity Building Anggota DPRD - "Membangun Semangat Kepemimpinan dan Integritas dalam Perencanaan Daerah";
 - b. Pemahaman Substansi Permendagri No. 10 Tahun 2025 dalam Penyusunan RKPD;
 - c. Peran DPRD dalam Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2026;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Muhamadiyah Surakarta;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Wonogiri;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri;
-

WORKSHOP



PENGUATAN PERAN DPRD DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025: MENYONGSONG RKPD 2026 YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57102 Telp. 0271-728373


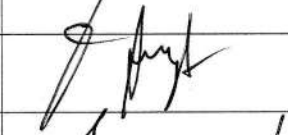
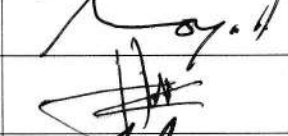

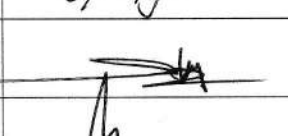
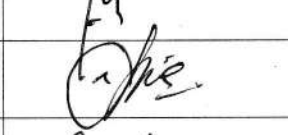
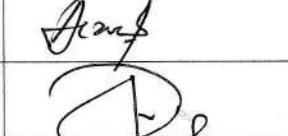
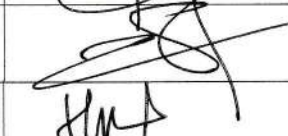
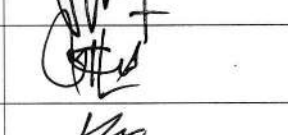
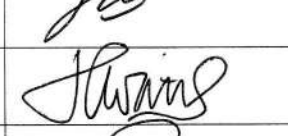


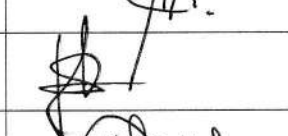
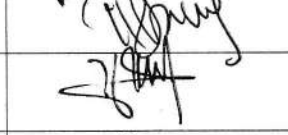



DAFTAR HADIR PESERTA


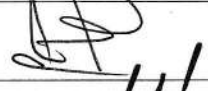





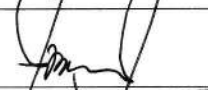


PEMBUKAAN

Jum'at, 30 Januari 2026

The Sunan Hotel Solo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRIYONO, S.Pd.	Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
2	SUGENG AHMADY	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
3	KRISYANTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
4	SURYO SUMINTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
5	ARUM SUBEKTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
6	BAMBANG SADRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
7	AZALEA PUTERI UTAMI, S.Tr.Li.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
8	ARI SUMANTRI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
9	URIN TRI HARTONO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
10	ZHAKARIA ANAN FACHRUZI, SST.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
11	DUDIE ADYTIA KURNIAWAN, S.ST.Par., S.E., M.M.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
12	RENI TORILIANA, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
13	WIDIYATNO, S.H	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

14	WAWAN ARIFianto, S.T	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
15	DWI PRASETYO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
16	AYU PUTRI KARMILASARI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
17	SUTOYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
18	SUPRAPTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
19	KISYANTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
20	SRI REJEKI, S.Ak.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
21	SARWO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
22	ANY WAHYU SETIAWATI, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
23	NYAMIK SAPTATI, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
24	YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
25	INDAH RETNOWATI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
26	SUYOTO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
27	MARIJI, S.IP.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
28	ASTARNO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
29	HAMID KURNIAWAN, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
30	IWAN SUSILO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
31	AHMAD NASIR	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
32	JATI WALUYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
33	GIMANTO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
34	TITIK SUGIYARTI, S.Sos.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
35	SUPRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
36	DANI MURSITO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
37	YADI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
38	HERU SUKOCO, S.Psi.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

39	SUSANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
40	H. ABDULLAH, S.Ag.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
41	NOVRI ROESMONO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
42	IRWAN HARI PURNOMO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
43	ROMANDHANI ANDANG NUGROHO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
44	LUTFI ANGGA PRADANA	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
45	INTAN KUSUMA SUSANTI, S.Gz.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
46	JOKO WARSITO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
47	SUGIHARNO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
48	ISKANDAR, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	



KOORDINATOR PELAKSANA

LABIB MUTTAQIN, SH.,M.H



WORKSHOP

PENGUATAN PERAN DPRD DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025: MENYONGSONG RKPD 2026 YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57102 Telp. 0271-728373

DAFTAR HADIR PESERTA


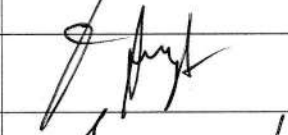
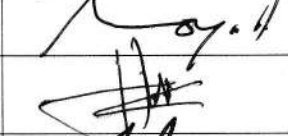

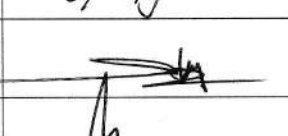
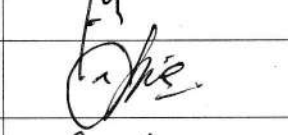
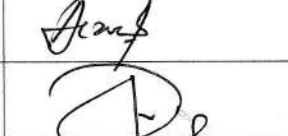
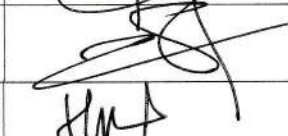
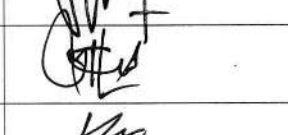
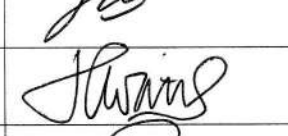


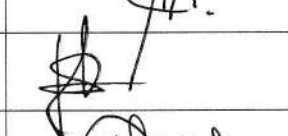
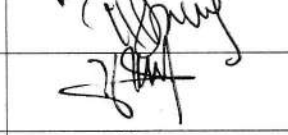



Capacity Building Anggota DPRD – “Membangun Semangat Kepemimpinan
dan Integritas dalam Perencanaan Daerah”


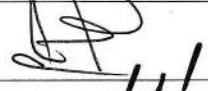





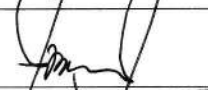


Pembicara : Eko Suseno, HRM, SE, MM. PFC

Jum'at, 30 Januari 2026

The Sunan Hotel Solo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRIYONO, S.Pd.	Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
2	SUGENG AHMADY	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
3	KRISYANTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
4	SURYO SUMINTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
5	ARUM SUBEKTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
6	BAMBANG SADRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
7	AZALEA PUTERI UTAMI, S.Tr.Li.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
8	ARI SUMANTRI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
9	URIN TRI HARTONO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
10	ZHAKARIA ANAN FACHRUZI, SST.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
11	DUDIE ADYTIA KURNIAWAN, S.ST.Par., S.E., M.M.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
12	RENI TORILIANA, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
13	WIDIYATNO, S.H	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

14	WAWAN ARIFIAN TO, S.T	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
15	DWI PRASETYO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
16	AYU PUTRI KARMILASARI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
17	SUTOYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
18	SUPRAPTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
19	KISYANTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
20	SRI REJEKI, S.Ak.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
21	SARWO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
22	ANY WAHYU SETIAWATI, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
23	NYAMIK SAPTATI, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
24	YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
25	INDAH RETNOWATI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
26	SUYOTO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
27	MARIJI, S.IP.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
28	ASTARNO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
29	HAMID KURNIAWAN, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
30	IWAN SUSILO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
31	AHMAD NASIR	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
32	JATI WALUYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
33	GIMANTO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
34	TITIK SUGIYARTI, S.Sos.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
35	SUPRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
36	DANI MURSITO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
37	YADI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
38	HERU SUKOCO, S.Psi.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

39	SUSANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
40	H. ABDULLAH, S.Ag.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
41	NOVRI ROESMONO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
42	IRWAN HARI PURNOMO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
43	ROMANDHANI ANDANG NUGROHO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
44	LUTFI ANGGA PRADANA	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
45	INTAN KUSUMA SUSANTI, S.Gz.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
46	JOKO WARSITO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
47	SUGIHARNO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
48	ISKANDAR, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	



KOORDINATOR PELAKSANA

LABIB MUTTAQIN, SH.,M.H



WORKSHOP

PENGUATAN PERAN DPRD DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025: MENYONGSONG RKPD 2026 YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57102 Telp. 0271-728373

DAFTAR HADIR PESERTA


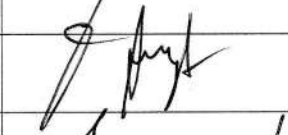
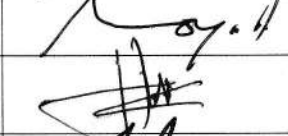

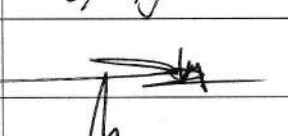
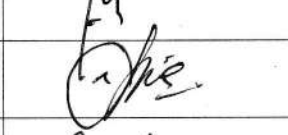
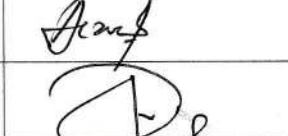
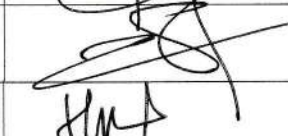
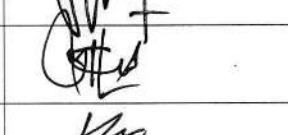
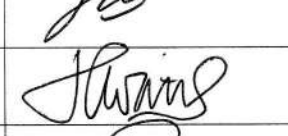


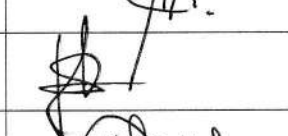
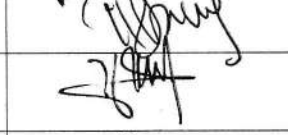



Penguatan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Daerah yang Akuntabel
Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025


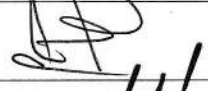





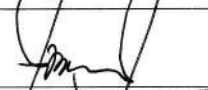


Pembicara : DR. Jaka Winarna M.SI., AK. (Akademisi UNS)

Sabtu, 31 Januari 2026

The Sunan Hotel Solo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRIYONO, S.Pd.	Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
2	SUGENG AHMADY	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
3	KRISYANTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
4	SURYO SUMINTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
5	ARUM SUBEKTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
6	BAMBANG SADRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
7	AZALEA PUTERI UTAMI, S.Tr.Li.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
8	ARI SUMANTRI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
9	URIN TRI HARTONO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
10	ZHAKARIA ANAN FACHRUZI, SST.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
11	DUDIE ADYTIA KURNIAWAN, S.ST.Par., S.E., M.M.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
12	RENI TORILIANA, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
13	WIDIYATNO, S.H	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

14	WAWAN ARIFIAN TO, S.T	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
15	DWI PRASETYO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
16	AYU PUTRI KARMILASARI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
17	SUTOYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
18	SUPRAPTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
19	KISYANTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
20	SRI REJEKI, S.Ak.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
21	SARWO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
22	ANY WAHYU SETIAWATI, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
23	NYAMIK SAPTATI, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
24	YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
25	INDAH RETNOWATI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
26	SUYOTO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
27	MARIJI, S.IP.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
28	ASTARNO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
29	HAMID KURNIAWAN, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
30	IWAN SUSILO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
31	AHMAD NASIR	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
32	JATI WALUYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
33	GIMANTO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
34	TITIK SUGIYARTI, S.Sos.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
35	SUPRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
36	DANI MURSITO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
37	YADI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
38	HERU SUKOCO, S.Psi.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

39	SUSANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
40	H. ABDULLAH, S.Ag.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
41	NOVRI ROESMONO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
42	IRWAN HARI PURNOMO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
43	ROMANDHANI ANDANG NUGROHO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
44	LUTFI ANGGA PRADANA	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
45	INTAN KUSUMA SUSANTI, S.Gz.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
46	JOKO WARSITO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
47	SUGIHARNO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
48	ISKANDAR, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	



KOORDINATOR PELAKSANA

LABIB MUTTAQIN, SH.,M.H



WORKSHOP

PENGUATAN PERAN DPRD DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025: MENYONGSONG RKP D 2026 YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57102 Telp. 0271-728373

DAFTAR HADIR PESERTA


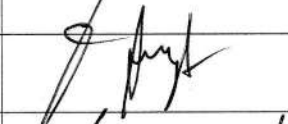

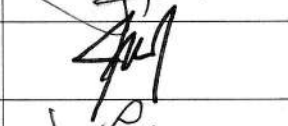
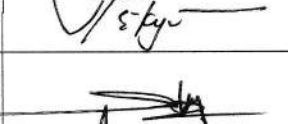
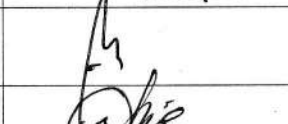
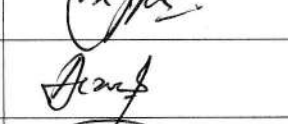

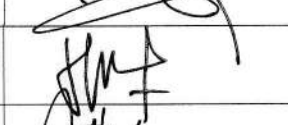


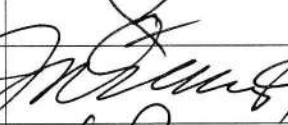

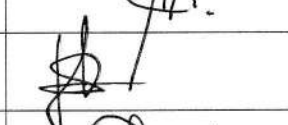

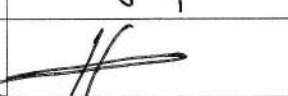


Peran DPRD dalam Mewujudkan RKP
D 2026 yang Transparan dan
Akuntabel


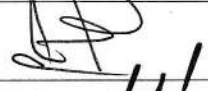





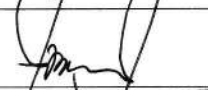


Pembicara : Andy Dwi Bayu Bawono, S.E, M.Si, P.hD (Akademisi UMS)

Sabtu, 31 Januari 2026

The Sunan Hotel Solo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRIYONO, S.Pd.	Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
2	SUGENG AHMADY	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
3	KRISYANTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
4	SURYO SUMINTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
5	ARUM SUBEKTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
6	BAMBANG SADRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
7	AZALEA PUTERI UTAMI, S.Tr.Li.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
8	ARI SUMANTRI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
9	URIN TRI HARTONO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
10	ZHAKARIA ANAN FACHRUZI, SST.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
11	DUDIE ADYTIA KURNIAWAN, S.ST.Par., S.E., M.M.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
12	RENI TORILIANA, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
13	WIDIYATNO, S.H	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

14	WAWAN ARIFIAN TO, S.T	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
15	DWI PRASETYO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
16	AYU PUTRI KARMILASARI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
17	SUTOYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
18	SUPRAPTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
19	KISYANTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
20	SRI REJEKI, S.Ak.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
21	SARWO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
22	ANY WAHYU SETIAWATI, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
23	NYAMIK SAPTATI, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
24	YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
25	INDAH RETNOWATI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
26	SUYOTO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
27	MARIJI, S.IP.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
28	ASTARNO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
29	HAMID KURNIAWAN, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
30	IWAN SUSILO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
31	AHMAD NASIR	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
32	JATI WALUYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
33	GIMANTO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
34	TITIK SUGIYARTI, S.Sos.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
35	SUPRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
36	DANI MURSITO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
37	YADI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
38	HERU SUKOCO, S.Psi.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

39	SUSANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
40	H. ABDULLAH, S.Ag.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
41	NOVRI ROESMONO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
42	IRWAN HARI PURNOMO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
43	ROMANDHANI ANDANG NUGROHO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
44	LUTFI ANGGA PRADANA	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
45	INTAN KUSUMA SUSANTI, S.Gz.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
46	JOKO WARSITO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
47	SUGIHARNO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
48	ISKANDAR, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	



KOORDINATOR PELAKSANA

LABIB MUTTAQIN, SH.,M.H



WORKSHOP

PENGUATAN PERAN DPRD DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025: MENYONGSONG RKPD 2026 YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57102 Telp. 0271-728373


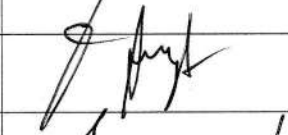
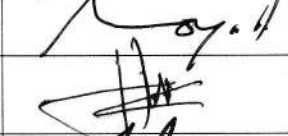

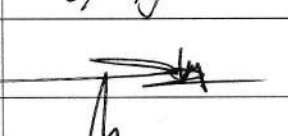
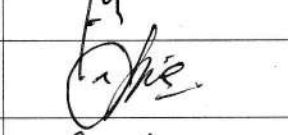
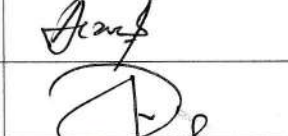
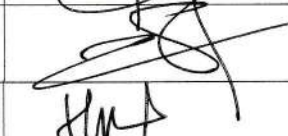
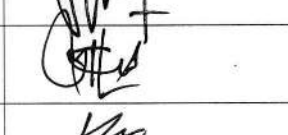
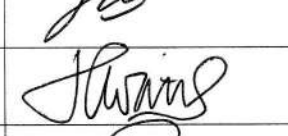


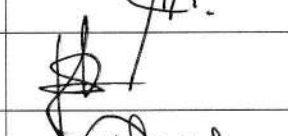
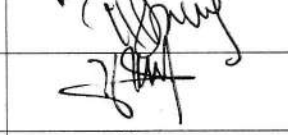



DAFTAR HADIR PESERTA


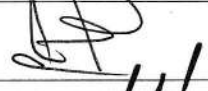





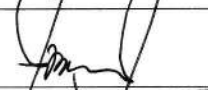


PENUTUPAN

Minggu, 1 Februari 2026

The Sunan Hotel Solo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRIYONO, S.Pd.	Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
2	SUGENG AHMADY	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
3	KRISYANTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
4	SURYO SUMINTO	Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri	
5	ARUM SUBEKTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
6	BAMBANG SADRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
7	AZALEA PUTERI UTAMI, S.Tr.Li.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
8	ARI SUMANTRI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
9	URIN TRI HARTONO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
10	ZHAKARIA ANAN FACHRUZI, SST.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
11	DUDIE ADYTIA KURNIAWAN, S.ST.Par., S.E., M.M.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
12	RENI TORILIANA, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
13	WIDIYATNO,S.H	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

14	WAWAN ARIFianto, S.T	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
15	DWI PRASETYO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
16	AYU PUTRI KARMILASARI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
17	SUTOYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
18	SUPRAPTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
19	KISYANTI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
20	SRI REJEKI, S.Ak.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
21	SARWO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
22	ANY WAHYU SETIAWATI, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
23	NYAMIK SAPTATI, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
24	YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
25	INDAH RETNOWATI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
26	SUYOTO, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
27	MARIJI, S.IP.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
28	ASTARNO, S.T.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
29	HAMID KURNIAWAN, S.E.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
30	IWAN SUSILO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
31	AHMAD NASIR	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
32	JATI WALUYO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
33	GIMANTO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
34	TITIK SUGIYARTI, S.Sos.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
35	SUPRIYANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
36	DANI MURSITO, S.H.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
37	YADI	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
38	HERU SUKOCO, S.Psi.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	

39	SUSANTO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
40	H. ABDULLAH, S.Ag.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
41	NOVRI ROESMONO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
42	IRWAN HARI PURNOMO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
43	ROMANDHANI ANDANG NUGROHO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
44	LUTFI ANGGA PRADANA	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
45	INTAN KUSUMA SUSANTI, S.Gz.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
46	JOKO WARSITO	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
47	SUGIHARNO, S.Pd.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	
48	ISKANDAR, A.Md.	Anggota DPRD Kab. Wonogiri	



KOORDINATOR PELAKSANA

LABIB MUTTAQIN, SH.,M.H



WORKSHOP

PENGUATAN PERAN DPRD DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025: MENYONGSONG RKPD 2026 YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57102 Telp. 0271-717417 Ext.

DAFTAR KEHADIRAN

DAFTAR KEHADIRAN PEMBICARA

Juma'at s/d Minggu, 30 Januari – 1 Februari 2026

The Sunan Hotel Solo

NO.	NAMA	MATERI	Hari/Tgl/jam	TANDA TANGAN
1	Eko Suseno, HRM, SE, MM. PFC	Capacity Building Anggota DPRD "Membangun Semangat Kepemimpinan dan Integritas dalam Perencanaan Daerah	Jum'at 30-01-2026 20.30 - 23.00	
2	DR. Jaka Winarna M.SI., AK (Akademisi UNS)	Penguatan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Daerah yang Akuntabel Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025	Sabtu, 31-01 - 2026 08.30 - 10.30	
3	Andy Bawono, M.Si, P.hD (Akademisi UMS)	Peran DPRD dalam Mewujudkan RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel	Sabtu, 31- 01- 2026 14.00 - 16.00	
4	TIM Panitia	Focus Group discussion	Sabtu, 01 -02 -2026 08.30 - 10.30	



Koordinator

Labib Muttaqin, SH., M.H



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

S E R T I F I K A T

Nomor KEMENDAGRI : 893.3.33/794 - 841/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UMS : 11/Pan.WS/UMS/II/2026

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Workshop antara Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 15 Januari 2026, menyatakan bahwa:



Foto
3X4

Nama : **Azalea Puteri Utami, S.Tr.Li.**
Jabatan: **Anggota**
Instansi: **DPRD Kab. Wonogiri**

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penguatan Peran DPRD dalam Implementasi Permendagri No. 10 Tahun 2025: Menyongsong RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel**" yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal Tanggal 30 Januari s/d 01 Februari 2026 bertempat di The Sunan Hotel Solo.



Surakarta, 01 Februari 2026
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
NIDN. 0028046501

MATERI PEMBELAJARAN

- 1. Capacity Building Anggota DPRD – “Membangun Semangat Kepemimpinan dan Integritas dalam Perencanaan Daerah”**
- 2. Penguatan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Daerah yang Akuntabel Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025**
- 3. Peran DPRD dalam Mewujudkan RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel**

Surakarta, 01 Februari 2026
Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri

EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos, M.Si.
NIP. 197009201990011001

Motivasi & Character Building DPRD

Membangun *Semangat* Kepemimpinan & Integritas
Dalam Perencanaan Daerah

Eko Suseno HRM, SE, MM PFC



People &

Spirituality

From
Good to
Great

Hakikat Kepemimpinan

suatu **seni** (*art*) dan **ilmu** (*science*)
untuk _____ orang lain,
atau orang-orang yang dipimpin
sehingga dari orang-orang yang
dipimpinnya timbul suatu
KEMAUAN, RESPECT,
KEPATUHAN dan
_____ terhadap
pemimpin untuk melaksanakan
apa yang dikehendaki oleh
pemimpin, atau tugas-tugas dan
tujuan organisasi,
secara efektif dan efisien



Berawal dari Masing-Masing Individu

Pertama, Individu



Kemudian Baru _____

**Perubahan HARUS dimulai dari masing-masing
INDIVIDU dan kemudian akan BERDAMPAK Terhadap**



5 Pekerti Integritas



Bersikap

INTEGRITAS

Bertanggung
jawab atas
hasil kerja

Jujur, tulus,
& dapat
dipercaya

Bertindak
transparan &
konsisten

Menjaga
martabat &
tidak
melakukan
hal-hal
tercela.

Amanah

A close-up photograph of two hands shaking in a firm grip. The hands are positioned in the center-left of the frame, with the fingers interlaced. The skin tones are natural, and the lighting is soft, highlighting the texture of the skin and the creases on the hands. The background is a plain, light gray, which makes the hands stand out. The overall mood is one of trust, agreement, and partnership.

_____/
titipan, atau sesuatu
yang dipercayakan
seseorang untuk
dijaga dan ditunaikan
dengan baik

3 level *Amanah*



"God Is The Owner & I'm The Manager"

Terima Kasih

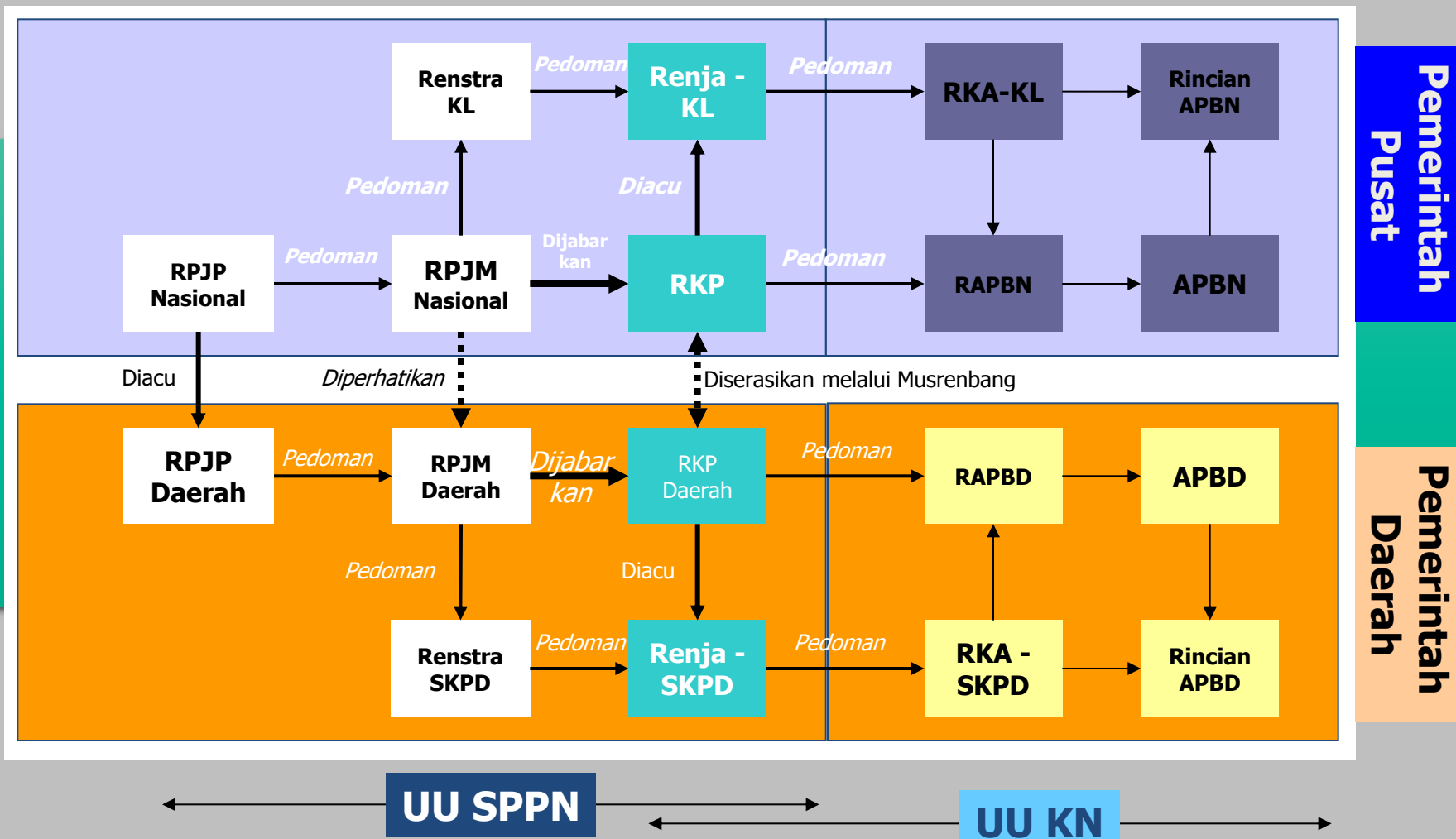


**PENGUATAN FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN DAERAH
SESUAI PERMEN NO.10 TAHUN 2025**

Jaka Winarna

Solo, 31 Januari 2026

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Mengapa Perencanaan Daerah Harus Akuntabel

- Tantangan perencanaan daerah saat ini:
 - Ketidaksinkronan RPJMD–RKPD–APBD
 - Program tidak berbasis kinerja & kebutuhan riil
 - Risiko politisasi perencanaan
- Dampak perencanaan tidak akuntabel:
 - Inefisiensi anggaran
 - Program tidak berdampak
 - Temuan pemeriksaan (BPK/APIP)
- Posisi strategis DPRD sebagai:
 - Representasi rakyat
 - Penjaga akuntabilitas perencanaan dan penganggaran

Pokok-pokok Permendagri 10 Tahun 2025

- Latar belakang lahirnya Permendagri 10/2025
- Prinsip utama perencanaan daerah menurut Permendagri 10/2025:
 - Akuntabilitas
 - Transparansi
 - Sinkronisasi pusat–daerah
 - Berbasis kinerja & hasil
- Perubahan penting dibanding regulasi sebelumnya (highlight saja):
 - Penajaman peran DPRD
 - Penekanan pada outcome & indikator kinerja
 - Keterkaitan perencanaan–penganggaran–pengawasan

Perencanaan Sebelum dan Setelah Permendagri 10 Th 2025

Aspek Kunci	Sebelum Permendagri 10/2025	Sesudah Permendagri 10/2025	Implikasi bagi DPRD
Arah Perencanaan	Administratif & prosedural	Akuntabel, berbasis kinerja & hasil	DPRD fokus menilai manfaat dan dampak , bukan sekadar kelengkapan dokumen
Basis Program	Kegiatan & input	Prioritas, outcome, dan dampak	DPRD perlu menguji relevansi program dengan kebutuhan masyarakat
Sinkronisasi Dokumen	RPJMD–RKPD–APBD sering tidak selaras	Wajib konsisten & berjenjang	DPRD mengawal konsistensi substansi antar dokumen perencanaan
Indikator Kinerja	Umum & sulit diukur	Spesifik, terukur, dan evaluatif	DPRD menuntut indikator jelas sebagai dasar pengawasan
Peran DPRD	Dominan di tahap persetujuan	Diperkuat sejak tahap perencanaan awal	DPRD terlibat aktif sejak RPJMD & RKPD , bukan hanya APBD
Penganggaran	Fokus besaran anggaran	Selaras dengan target kinerja	DPRD menilai rasionalitas anggaran terhadap target kinerja
Akuntabilitas	Formal (kepatuhan)	Substantif (hasil & dampak)	DPRD memperkuat pengawasan berbasis kinerja
Pengendalian & Evaluasi	Terpisah dari perencanaan	Terintegrasi dalam satu siklus	DPRD memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan

Fungsi DPRD dalam Perencanaan Daerah

- Fungsi DPRD yang relevan langsung dengan perencanaan:
 1. Fungsi legislasi → regulasi pendukung perencanaan
 2. Fungsi anggaran → pembahasan KUA-PPAS & APBD
 3. Fungsi pengawasan → konsistensi dokumen & implementasi
- Kedudukan DPRD dalam siklus perencanaan:
 - RPJPD
 - RPJMD
 - RKPD
 - KUA-PPAS
 - APBD

Peran DPRD dalam Setiap Tahap Perencanaan

a. Pada Tahap Penyusunan RPJMD

- Menilai:
 - Konsistensi visi-misi kepala daerah
 - Keterkaitan dengan RPJPD & RPJMN
- Pertanyaan kunci DPRD:
 - Apakah target RPJMD terukur?
 - Apakah indikator kinerjanya realistis?

b. Pada Tahap RKPD

- Menilai:
 - Prioritas pembangunan tahunan
 - Kesesuaian dengan RPJMD
- Risiko umum:
 - Program “titipan”
 - Duplikasi kegiatan

c. Pada Tahap KUA–PPAS & APBD

- Menilai:
 - Kesesuaian anggaran dengan prioritas RKPD
 - Rasionalitas alokasi anggaran
- Fokus DPRD:
 - Outcome, bukan hanya nominal

Akuntabilitas Perencanaan, yang Harus Dijaga DPRD

- Dimensi akuntabilitas perencanaan:
 1. Akuntabilitas kebijakan
 2. Akuntabilitas kinerja
 3. Akuntabilitas keuangan
- Indikator perencanaan akuntabel:
 - Tujuan jelas
 - Indikator terukur
 - Anggaran mendukung target
 - Dapat dievaluasi

Sinergi DPRD dengan Aktor Pengawasan Lain

- Sinergi DPRD dengan:
 - Kepala daerah & perangkat daerah
 - APIP (Inspektorat)
 - BPK
 - Partisipasi publik
- Pemanfaatan hasil:
 - LHP BPK
 - Hasil evaluasi kinerja
 - Laporan APIPuntuk perbaikan perencanaan ke depan.

Tantangan Nyata & Strategi Penguatan Peran DPRD

- Tantangan umum DPRD:
 - Keterbatasan waktu pembahasan
 - Asimetri informasi
 - Tekanan politik
- Strategi penguatan:
 - Peningkatan kapasitas anggota DPRD
 - Penguatan peran alat kelengkapan DPRD
 - Pemanfaatan tenaga ahli
 - Pendekatan berbasis data & kinerja

Ringkasan

- DPRD adalah penjaga kualitas perencanaan daerah
- Permendagri 10/2025 memberi ruang lebih kuat bagi DPRD
- Akuntabilitas dimulai dari perencanaan yang benar
- DPRD kuat → perencanaan berkualitas → pembangunan berdampak

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

PERAN STRATEGIS RKPD

- Kebijakan Umum APBD (KUA)
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- APBD Tahun Anggaran 2026

Landasan Hukum Penyusunan RKPD Th 2026

- UU No. 25 Th 2004 tentang SPPN
- UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- Permendagri N0 10 Th 2025

Prinsip Penyusunan RKPD

- UU No. 25 Th 2004 tentang SPPN
- Keterpaduan Perencanaan Pusat dan Daerah
- Pendekatan berbasis Kinerja dan Hasil
- Penguatan penggunaan data dan indikator
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
- Partisipasi masyarakat yang bermakna

Tahap Persiapan Penyusunan RKPD

- Pembentukan tim penyusun RKPD
- Penyusunan jadwal dan rencana kerja penyusunan RKPD
- Pengumpulan dan pengolahan data pembangunan daerah
- Penelaahan kebijakan nasional dan provinsi

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

- Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya
- Evaluasi capaian RPJMD
- Analisis kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah
- Penelaahan kebijakan nasional dan provinsi

Forum Konsultasi Publik sebagai Tahap Partisipatif

- Menjaring aspirasi masyarakat
- Mengidentifikasi kebutuhan riil pembangunan
- Meningkatkan transparansi perencanaan
- Membangun rasa memiliki terhadap dokumen RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

- Menjaring aspirasi masyarakat
- Mengidentifikasi kebutuhan riil pembangunan
- Meningkatkan transparansi perencanaan
- Membangun rasa memiliki terhadap dokumen RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

- Tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- Prioritas pembangunan daerah
- Program dan kegiatan prioritas
- Indikator kinerja dan target capaian
- Pagu indikatif per perangkat daerah

Penyesuaian dengan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada tahap ini dilakukan:

- Proyeksi pendapatan daerah
- Penyesuaian belanja daerah
- Penentuan kapasitas fiskal
- Penyelarasan program dengan kemampuan keuangan

Berikut contoh tabel sederhana kerangka ekonomi daerah:

Komponen	Proyeksi Tahun 2026
Pendapatan Daerah	Rp 2,5 Triliun
Belanja Daerah	Rp 2,45 Triliun
Pembiayaan	Rp 50 Miliar

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

- Penyempurnaan indikator dan target kinerja
- Penajaman prioritas pembangunan
- Konsistensi dengan dokumen perencanaan lain
- Finalisasi struktur dan substansi RKPD

Penetapan RKPD Tahun 2026

Tahap terakhir adalah penetapan RKPD oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah.

RKPD yang telah ditetapkan menjadi:

- Pedoman penyusunan KUA dan PPAS
- Acuan penyusunan Renja perangkat daerah
- Dasar pengendalian dan evaluasi pembangunan

Dengan penetapan ini, siklus perencanaan tahunan daerah secara resmi dimulai.

Terima Kasih



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA

UMS



Peran DPRD dalam Mewujudkan RKPD 2026 yang Transparan dan Akuntabel



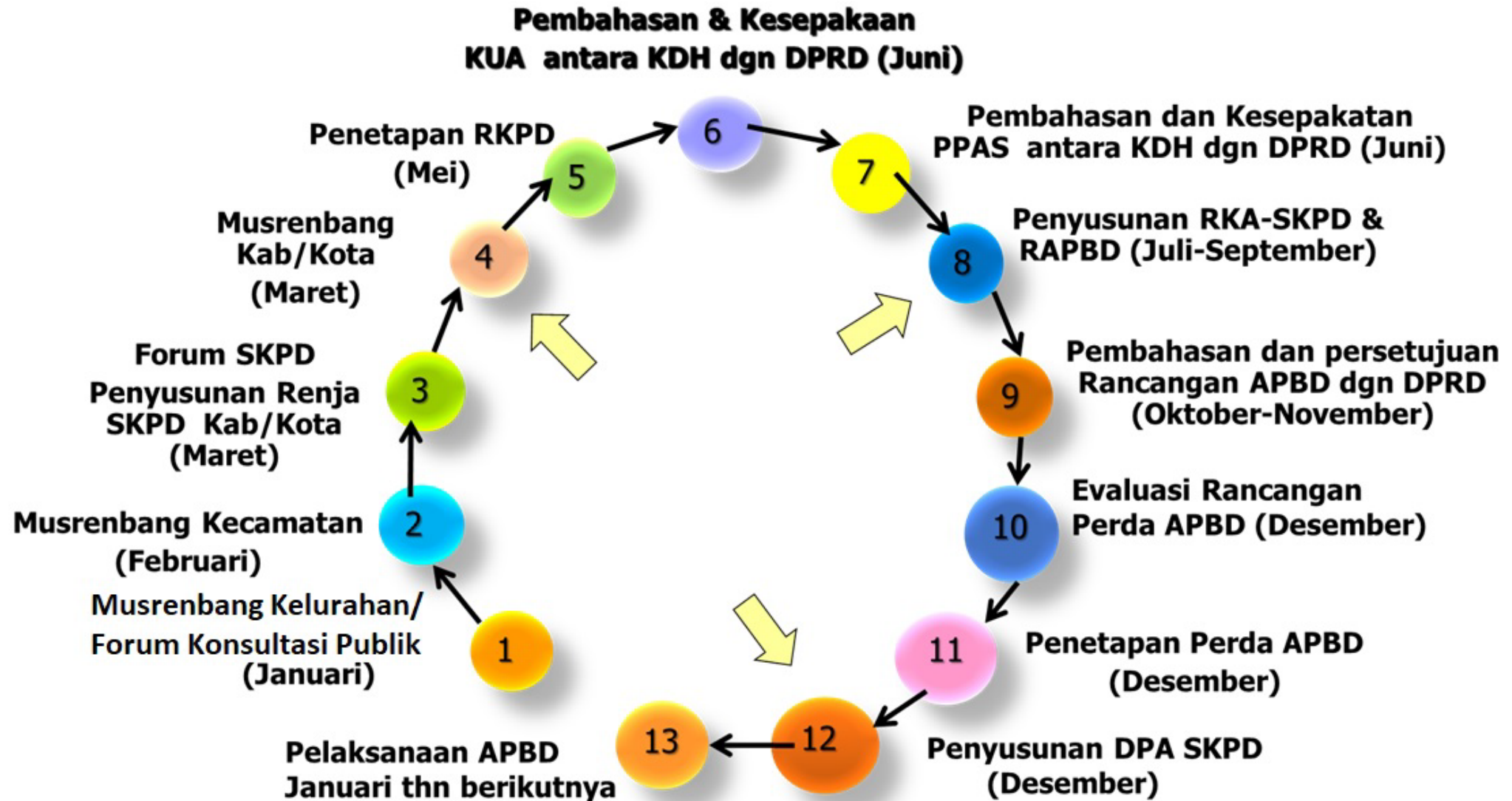
Andy D.B Bawono, Ph.D

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PKD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Siklus Perencanaan dan Penganggaran di Daerah



SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN KABUPATEN & DESA





RKPD 2026 YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN TITIK KRITIS YANG HARUS DIAWASI

Konsistensi Perencanaan–Penganggaran (RKPD → KUA-PPAS → APBD)

Kondisi riil yang sering terjadi:

- Dalam APBD 2026, Cek Program prioritas di RKPD tidak sepenuhnya “muncul” dalam APBD (atau berubah nama/kegiatan).
- Apakah ada “program titipan” yang tidak nyambung dengan prioritas RKPD.
- Pergeseran anggaran terjadi saat pembahasan, perubahan APBD, atau pergeseran antar kegiatan.

Titik kritis pengawasan DPRD:

- Pastikan program prioritas RKPD 2026 menjadi prioritas belanja di APBD 2026.
- Kalau perlu buat **matriks keterkaitan**: *Prioritas RKPD → Program → Kegiatan → Subkegiatan → Output → Lokasi → Pagu*

Instrumen transparansi:

- Minta Pemda menampilkan “**budget tagging RKPD**” dalam dokumen KUA-PPAS dan Anggaran.

Ketepatan Data Sasaran (Targeting) – khususnya warga miskin & rentan

Kondisi riil yang sering terjadi:

- Banyak program sosial tidak tepat sasaran karena basis data tidak mutakhir.
- Program “merata” tetapi dampaknya kecil (tidak fokus ke kantong kemiskinan).

Titik kritis pengawasan DPRD:

- DPRD perlu memastikan RKPD 2026 menggunakan data sasaran yang valid:
 - Data kemiskinan/desil, DTKS/registrasi sosial, by name by address (BNBA).
- Program harus punya peta lokasi prioritas (kecamatan/desa/kelurahan).

Uji Akuntabilitas:

- Setiap program bantuan wajib memiliki mekanisme verifikasi penerima dan kanal pengaduan.

Fokus Outcome, bukan sekadar Serapan Anggaran

Kondisi riil yang sering terjadi:

- OPD sering mengejar “serapan 95–100%”, tetapi outcome kecil.
- Laporan kinerja masih dominan output administratif.

Titik kritis pengawasan DPRD:

- Minta indikator RKPD diterjemahkan menjadi:
 - Outcome (perubahan) + baseline + target 2026 + unit pengampu
- DPRD perlu menolak kegiatan yang indikatornya hanya “terlaksana”, “terfasilitasi”, “tersusun”.

Beberapa Indikator yang perlu lebih menjadi pengukuran:

- Penurunan angka kemiskinan (bukan “jumlah rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan”)
- Peningkatan akses air bersih (bukan “jumlah sosialisasi”)
- Peningkatan jalan mantap (bukan “jumlah paket pemeliharaan”)

Pendapatan Daerah & Ruang Fiskal (ketahanan APBD)

Kondisi riil yang sering terjadi:

- Ketergantungan transfer pusat masih tinggi.
- PAD sulit naik cepat tanpa strategi intensifikasi-ekstensifikasi.

Titik kritis pengawasan DPRD:

- Pastikan target pendapatan RKPD 2026 realistis dan ada strategi:
 - optimalisasi pajak daerah/retribusi,
 - digitalisasi pemungutan,
 - pengendalian kebocoran,
- Intensifikasi aset daerah produktif.

Uji akuntabilitas:

- Minta laporan **Cost of Collection** (Biaya Pemungutan) dan efektivitasnya.

Kualitas belanja layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur)

Kondisi riil yang sering terjadi:

- Layanan dasar sering terhambat oleh:
 - ketimpangan antar wilayah,
 - fasilitas kurang memadai,
 - SDM tidak merata,
 - akses sulit di wilayah tertentu

Titik kritis pengawasan DPRD:

- DPRD perlu memastikan program RKPD 2026:
 - mengurangi kesenjangan layanan,
 - bukan hanya pembangunan “di pusat kota”.

Kemiskinan, pengangguran, dan daya tahan ekonomi rumah tangga

Kondisi riil yang sering terjadi:

- Program di tiap OPD perlu koordinasi serius, tidak hanya outputnya “jumlah rapat” tapi tanpa eksekusi.
- Struktur ekonomi masih kuat di sektor tradisional/UMKM,
- banyak pekerja rentan dan migrasi kerja,
- daya beli rumah tangga sensitif terhadap harga pangan/energi.

Titik kritis pengawasan DPRD:

- Dorong adanya Program tematik lintas OPD dengan satu coordinator, target Bersama, pembagian peran jelas, anggaran terkunci, laporan kinerja terpadu.
- Program ekonomi jangan hanya pelatihan, tetapi harus ada:
 - akses pasar (online/konvensional),
 - akses pembiayaan,
 - pendampingan usaha,
 - hilirisasi produk lokal,
 - kemitraan BUMDes/UMKM.

Uji akuntabilitas:

- Ukur keberhasilan program ekonomi dengan **kenaikan omzet/tenaga kerja**, bukan “jumlah peserta”.



MATRIKS RKPD KAB WONOGIRI 2026 VS PROGRAM OPD

PRIORITAS 1 — Peningkatan Kualitas SDM & Layanan Dasar

(RKPD menekankan layanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat)

Prioritas RKPD 2026	OPD Pengampu (Leading)	OPD Pendukung	Program OPD yang Relevan	Indikator Outcome yang Wajib Ada	Titik Kritis DPRD (Pengawasan)	Risiko Utama	Bukti Transparansi yang Harus Dibuka
Pendidikan berkualitas & merata	Dinas Pendidikan	Bappeda, BKPSDM, Diskominfo	Program peningkatan mutu pendidikan, sarpras sekolah, peningkatan kompetensi guru	APS/APM, kualitas layanan sekolah, pemerataan akses (wilayah pinggiran)	Pastikan program tidak dominan “rapat/pelatihan” tetapi berdampak pada mutu layanan	Ketimpangan sekolah antar wilayah; belanja sarpras tidak tepat prioritas	Peta sekolah prioritas, data kondisi ruang kelas, daftar paket sarpras
Kesehatan masyarakat & layanan dasar	Dinkes	RSUD, DP3AP2KB, Disperkim, Dinsos	Program kesehatan ibu-anak, gizi/stunting, layanan puskesmas, promotif-preventif	Penurunan stunting, cakupan layanan ibu-anak, capaian imunisasi/layanan dasar	Uji apakah target berbasis baseline & wilayah lokus	Program seremonial; data lokus tidak akurat	Daftar lokus stunting, dashboard capaian per puskesmas
Perlindungan sosial & kelompok rentan	Dinsos	Disdukcapil, DP3AP2KB, DiskopUKM	Program penanganan kemiskinan, bantuan sosial, pemberdayaan rentan	Penurunan kemiskinan ekstrem, ketepatan sasaran bantuan	Wajib BNBA, verifikasi penerima, kanal pengaduan	Tidak tepat sasaran, penerima ganda, politisasi bantuan	Daftar penerima, kriteria, berita acara verifikasi
Ketahanan pangan & gizi	DKPP/Dispertan	Dinkes, Disperdag, Bappeda	Program produksi pangan, penguatan petani, stabilisasi harga	Ketersediaan pangan, produktivitas, stabilitas harga komoditas	Pastikan intervensi menysasar sentra produksi & rantai pasok	Kegiatan kecil tersebar, tidak menekan harga	Data produksi, lokasi intervensi, monitoring harga

PRIORITAS 2 — Penguatan Ekonomi Daerah, UMKM, dan Penyerapan Tenaga Kerja

(RKPD menekankan penguatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan)

Prioritas RKPD 2026	OPD Pengampu (Leading)	OPD Pendukung	Program OPD yang Relevan	Indikator Outcome yang Wajib Ada	Titik Kritis DPRD (Pengawasan)	Risiko Utama	Bukti Transparansi
Penguatan UMKM, koperasi, ekonomi produktif	DiskopUKM/Disperindag	DPMPTSP, Bappeda, Diskominfo	Program pembinaan UMKM, akses pembiayaan, kemitraan pasar	Naik omzet UMKM binaan, jumlah UMKM naik kelas, serapan tenaga kerja	Jangan hanya pelatihan; harus ada pendampingan + akses pasar	Output tinggi tapi outcome rendah	Daftar UMKM binaan, indikator naik kelas, laporan omzet (sampling)
Investasi & iklim usaha	DPMPTSP	Disperindag, Diskominfo	Program promosi investasi, kemudahan perizinan	Waktu layanan perizinan turun, realisasi investasi naik	DPRD uji “hambatan nyata” dan solusi layanan digital	Perizinan lambat, layanan tidak digital	SOP layanan, data SLA perizinan
Penyerapan tenaga kerja & produktivitas	Disnaker (jika ada) / OPD terkait	DiskopUKM, Disperindag	Pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar	Penempatan kerja, sertifikasi kompetensi, penurunan pengangguran	Pastikan link and match dengan industri lokal	Pelatihan tidak relevan	Data penempatan alumni pelatihan

PRIORITAS 3 — Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, dan Permukiman

(RKPD menekankan pembangunan infrastruktur untuk layanan dasar dan ekonomi)

Prioritas RKPD 2026	OPD Pengampu (Leading)	OPD Pendukung	Program OPD yang Relevan	Indikator Outcome yang Wajib Ada	Titik Kritis DPRD	Risiko Utama	Bukti Transparansi
Jalan, jembatan, konektivitas ekonomi	DPUPR	Dishub, Bappeda	Pembangunan/rehab jalan, jembatan, jalan produksi	Persentase jalan mantap, akses ke sentra ekonomi	Minta daftar ruas prioritas + alasan (kebutuhan ekonomi)	Kualitas rendah, terlambat tender	Daftar ruas, RAB, jadwal tender, progres mingguan
Air bersih, sanitasi, permukiman	Disperkim/DPUPR	Dinkes, DLH	Program SPAM, sanitasi, penataan permukiman	Cakupan akses air bersih & sanitasi layak	Fokus wilayah dengan backlog tinggi	Pekerjaan tidak tepat sasaran	Data backlog, peta lokasi, daftar penerima
Irigasi & pertanian	DPUPR/Dispertan	DKPP	Rehabilitasi irigasi, sarana produksi	Produktivitas pertanian, indeks pertanaman	Uji keterkaitan dengan target pangan	Paket kecil tidak berdampak	Daftar daerah irigasi, output & outcome
Infrastruktur layanan publik	OPD teknis	Bappeda	Pembangunan fasilitas layanan	Kualitas layanan meningkat (bukan sekadar bangunan berdiri)	Pastikan ada rencana operasional pasca pembangunan	Bangunan tidak terpakai optimal	Rencana operasional, SDM, biaya pemeliharaan

PRIORITAS 4 — Reformasi Birokrasi, Tata Kelola, dan Transparansi Keuangan

(RKPD menekankan tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik)

Prioritas RKPD 2026	OPD Pengampu	OPD Pendukung	Program OPD	Indikator Outcome	Titik Kritis DPRD	Risiko	Bukti Transparansi
Akuntabilitas kinerja & kualitas perencanaan	Bappeda	Inspektorat, BPKAD	Program perencanaan, money, pengendalian program	Kualitas capaian indikator, konsistensi RKPD-APBD	DPRD minta “Matriks konsistensi” dan evaluasi triwulan	Indikator formalitas	Laporan money, dashboard kinerja
Penguatan pengawasan internal	Inspektorat	Semua OPD	Audit kinerja, audit kepatuhan, reviu pengadaan	Persentase tindak lanjut temuan meningkat	Fokus audit pada area rawan (bansos, pengadaan)	Temuan berulang	LHP Inspektorat, rekap tindak lanjut
Transparansi keuangan & belanja	BPKAD	Diskominfo	Pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu laporan, efisiensi belanja	DPRD cek belanja rutin vs belanja publik	Belanja tidak efisien	Ringkasan APBD, realisasi bulanan
Digitalisasi layanan publik	Diskominfo	Semua OPD	SPBE, layanan online, keterbukaan data	Layanan publik lebih cepat & mudah	Pastikan layanan benar-benar dipakai warga	Sistem ada tapi tidak digunakan	Statistik pengguna, SLA layanan

PRIORITAS 5 — Ketahanan Sosial, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup

(RKPD memuat arah ketahanan sosial dan pengelolaan lingkungan/risiko)

Prioritas RKPD 2026	OPD Pengampu	OPD Pendukung	Program OPD	Indikator Outcome	Titik Kritis DPRD	Risiko	Bukti Transparansi
Ketahanan sosial & pemberdayaan masyarakat	Kesbangpol/O PD sosial	Camat/Desa, Dinsos	Penguatan partisipasi, pemberdayaan	Konflik sosial menurun, partisipasi meningkat	DPRD uji dampak, bukan hanya jumlah kegiatan	Seremonial	Data kegiatan + evaluasi
Lingkungan hidup & pengelolaan sampah	DLH	Disperkim, DPUPR	Pengelolaan sampah, kualitas lingkungan	Penurunan timbulan sampah, layanan meningkat	Pastikan ada sistem operasional, bukan hanya sosialisasi	Infrastruktur tanpa pengelola	Data volume sampah, cakupan layanan
Kebencanaan & mitigasi	BPBD	DPUPR, DLH	Mitigasi, kesiapsiagaan	Risiko dan dampak bencana menurun	Fokus pada titik rawan	Respons lambat	Peta risiko, rencana kontinjensi

Apa Lagi yang bisa dilakukan?

DPRD Wonogiri perlu mengunci RKPD 2026 melalui pengawasan pada 5 simpul akuntabilitas:

- konsistensi RKPD–APBD,
- ketepatan data sasaran,
- indikator outcome yang terukur,
- pengadaan proyek strategis yang transparan,
- pelaporan kinerja triwulanan yang terbuka.

Pertanyaan kunci DPRD saat pembahasan RKPD → KUA-PPAS → APBD:

- Apa 10 program prioritas RKPD 2026? dan berapa pagunya di APBD?
- Indikator outcome apa yang berubah nyata di 2026?
- Program mana yang menysasar kemiskinan? Siapa penerimanya (BNBA)?
- Paket fisik strategis apa saja? Kapan tender dan selesai?
- Temuan Inspektorat/BPK tahun lalu: apa tindak lanjutnya?
- Apakah ada program tumpang tindih antar OPD?

“Dashboard RKPD 2026” (Memuat target IKU, realisasi triwulanan, capaian outcome sementara, kendala, tindak lanjut, dan daftar paket strategis).

CATATAN:

1. Pajak dan Retribusi adalah symbol baik tidaknya perekonomian, kalau ingin dua hal ini meningkat, perlu perbaikan tata Kelola lainnya, missal peningkatan kunjungan/wisata, peningkatan investasi.
2. Menjadikan Wonogiri sebagai daerah tempat tinggal yang nyaman
→ Peningkatan IPM.
3. Wonogiri memiliki potensi luar biasa, perlu diolah (Pantai, Waduk, Gunung, Wisata Agro, dst.)
4. Capaian2 SPM, Pendidikan Kesehatan sudah baik, bagaimana dengan Air Minum, Air Limbah, Sosial, dst.

TERIMA KASIH

